



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A
SK BAN-PT No:468/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Strategi Peningkatan E-literacy Masyarakat Dalam Pelaksanaan
E-Government Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Bandung**

Skripsi
Oleh
Novianti
2015310051

**Bandung
2018**



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A
SK BAN-PT No:468/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Strategi Peningkatan E-literacy Masyarakat Dalam Pelaksanaan
E-Government Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Bandung**

Skripsi
Oleh

Novianti
2015310051

Pembimbing

Maria Rosarie Harni Triastuti S.IP., M.Si

Bandung
2018

Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novianti
NPM : 2015310051
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Strategi Peningkatan E-literacy
Masyarakat Dalam Pelaksanaan E-government oleh Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Bandung

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah milik saya sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, telah ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan yang telah saya buat dan ditulis langsung oleh penulis yakni saya sendiri merupakan pernyataan yang dapat di pertanggung jawabkan dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar atau tidak valid.

Bandung,20 December 2018

Novianti

Abstrak

Nama : Novianti
NPM : 2015310051
Judul : Strategi peningkatan *E-literacy* masyarakat dalam pelaksanaan *E-Government* Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 3 hal yakni (1) kondisi kelompok sasaran literasi digital ; (2) strategi yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di dalam membangun kesadaran *e-literacy* masyarakat di dalam pelaksanaan *e-government* ; (3) kesesuaian antara strategi yang digunakan dengan kondisi kelompok sasaran literasi digital. Deskripsi tersebut dilakukan dengan menggunakan dasar teori strategi literasi digital yang mengacu pada 5 indikator strategi literasi digital dan 11 indikator literasi digital di masyarakat. 5 indikator strategi literasi digital terdiri dari penguatan penggunaan aplikasi atau perangkat digital; peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu; perluasan akses sumber belajar dan cakupan peserta belajar; peningkatan pelibatan publik dan penguatan tata kelola. Selain itu , 11 indikator literasi digital di masyarakat terdiri dari Meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki setiap fasilitas publik; Meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital setiap hari; Meningkatnya jumlah bahan bacaan literasi digital yang dibaca oleh masyarakat setiap hari; Meningkatnya jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga, atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan literasi digital; Meningkatnya jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi digital; Meningkatnya jumlah kegiatan literasi digital yang ada di masyarakat; Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi digital; Meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat; Meningkatnya pemanfaatan media digital dan internet dalam memberikan akses informasi dan layanan publik; Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan internet dan UU ITE; Meningkatnya angka ketersediaan akses dan pengguna (melek) internet suatu daerah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari 2 hal yaitu (1) wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu aparaturnya Diskominfo Kota Bandung (40 orang); siswa-siswi SMAN 11 (15 orang); dan siswa-siswi SMAN 5 (15 orang). (2) studi dokumen yaitu dokumen presentasi oleh Diskominfo Kota Bandung; hasil-hasil penelitian terdahulu tentang gerakan literasi nasional dan *e-government*; dan publikasi media cetak dan media elektronik tentang literasi digital.

Berdasarkan data-data dan temuan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa kondisi literasi digital tidak sesuai dengan sebelas indikator literasi digital masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut tergambar pada indikator : (1) membaca bahan bacaan literasi digital setiap harinya; (2) jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi digital; (3) jumlah kegiatan literasi digital yang ada di

masyarakat; (4) partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi digital. Selanjutnya, strategi literasi digital belum membangun kesadaran *E-literacy* masyarakat di dalam pelaksanaan pengembangan *E-government* yaitu strategi penguatan tata kelola. Terakhir, belum sesuai antara strategi yang diterapkan dengan kondisi yang ada di lapangan. Hal ini terlihat pada: (1) indikator kedua dan ketiga dari literasi digital masyarakat tidak sesuai dengan strategi kedua literasi digital. (2) Indikator kelima dari literasi digital masyarakat tidak sesuai dengan strategi ketiga literasi digital. (3) Indikator keempat dari literasi digital masyarakat tidak sesuai dengan strategi keempat dari literasi digital. (4) Indikator ketujuh dari literasi digital masyarakat tidak sesuai dengan strategi kelima dari literasi digital.

Kata kunci: *E-government*, Strategi, *E-literacy*

Abstract

Nama : Novianti
NPM : 2015310051
Judul : Strategy For Increasing Community E-Literacy In Implementation
E-Government At The Bandung Communication And Information
Office

This study aims to describe 3 things namely (1) the condition of the digital literacy target group; (2) strategies used by the Office of Communication and Information Technology in building awareness of e-literacy of the community in implementing e-government; (3) compatibility between the strategies used with the conditions of the digital literacy target group. The description is carried out using the basis of digital literacy strategy theory which refers to 5 digital literasai strategy indicators and 11 digital literacy indicators in the community. 5 literasai digital strategy indicators consist of strengthening the use of digital applications or devices; increasing the number and variety of quality learning resources; expanding access to learning resources and coverage of learning participants; increasing public involvement and strengthening governance. In addition, 11 indicators of digital literacy in the community consist of increasing the number and variety of digital literacy reading materials owned by each public facility; increasing the frequency of reading digital literacy reading materials every day; The increasing number of digital literacy reading materials that are read by the public every day; The increasing number of active participation of communities, institutions, or agencies in the provision of digital literacy reading materials; The increasing number of public facilities that support digital literacy; The increasing number of digital literacy activities in the community; Increased active participation of the community in digital literacy activities; The increasing number of digital literacy training that is applicable and has an impact on society; Increased use of digital media and the internet in providing access to information and public services; Increased public understanding regarding internet usage and ITE Law; Increased numbers of availability of access and internet literacy of an area.

The research method used in this study is a qualitative method. Data collection techniques in this study consisted of 2 things, namely: (1) interviews conducted with several speakers, namely the Bandung City Diskominfo apparatus (40 people); high school students 11 (15 people); and students of SMAN 5 (15 people). (2) study of documents namely presentation documents by Diskominfo Bandung City; the results of previous research on the national literacy and e-

government movement; and print media and electronic media publications about digital literacy.

Based on the data and findings in this study, it can be concluded that the condition of digital literacy does not fit the eleven indicators of community digital literacy. The incompatibility is illustrated in the indicators: (1) reading digital literacy reading material every day; (2) the number of public facilities that support digital literacy; (3) the number of digital literacy activities in the community; (4) active participation of the community in digital literacy activities. Furthermore, the digital literacy strategy has not yet built awareness of the E-literacy of the community in implementing E-government development, namely the strategy to strengthen governance. Finally, there is a lack of agreement between the strategies applied to the conditions in the field. This can be seen in: (1) the second and third indicators of community digital literacy are not in accordance with the second strategy of digital literacy. (2) The fifth indicator of community digital literacy is not in accordance with the third strategy of digital literacy. (3) The fourth indicator of community digital literacy is not in accordance with the fourth strategy of digital literacy. (4) The seventh indicator of community digital literacy is not in accordance with the fifth strategy of digital literacy.

Keywords: E-government, Strategy, E-literacy

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang telah dilimpahkan pada penulis khususnya, hal ini dikarenakan penulis di dalam proses pengerjaan skripsi ini dapat dan mampu menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan tepat waktu. Adapun judul dari pada penulisan skripsi ini “Strategi Peningkatan E-literacy Masyarakat Dalam Pelaksanaan E-Government Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Setiap penulisan tentu tidak mungkin tidak memiliki tantangan dan hambatan di dalam penyelesaiannya. Di dalam penulisan skripsi ini tentu penulis pasti mengalami berbagai macam tantangan dan hambatan yang berasal dari berbagai macam tingkatan kesulitannya. Akan tetapi kunci utama penulis dalam menyikapi tantangan di dalam setiap tingkat masalah yang menghampiri penulis di dalam proses penelitian ini tidak terlepas daripada dukungan-dukungan beberapa pihak. Beberapa pihak tersebut yang senantiasa memberikan dukungan baik itu dukungan moril maupun dukungan non moril, serta selalu mendoakan penulis dan selalu setia menemani penulis dari awal pembuatan seminar ini.

Dalam kesempatan ini pun penulisan ingin mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Dr.Pius Sugeng Prasetyo,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Dr.Tutik Rachmawati,S.IP.,MA. Selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.

3. Maria Rosarie Harni Triastuti,S.IP.,M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa mengoreksi secara lengkap dan terperinci, memberikan pengarahan , dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini serta Beliau juga selalu memastikan murid bimbingan Beliau secara terperinci dan lengkap telah menyelesaikan setiap aspek penilaian dari pada skripsi itu sendiri yang terdiri dari power point, paper penyajian, hingga bagian administratif. Selain itu penulis ingin berterimakasih akan waktu yang telah Beliau sediakan untuk menerima saya sebagai anak bimbingan Beliau dan Beliau bersedia membantu dalam hal bertukar pikiran hingga membantu penulisan dalam menyusun skripsi ini.
4. Seluruh Dosen, staff, karyawan administrasi, dan pekarya di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, yang telah banyak membantu penulis di dalam menunjang kegiatan perkuliahan selama ini.
5. Papi, Mami, dan Kakak Kandung Saya yang menjadi “*Role Model*” di dalam kehidupan saya, yang selalu menanyakan akan kesulitan yang saya hadapi selama proses penulisan skripsi ini, namun tidak lupa untuk menyemangati saya agar mampu menyelesaikan seminar ini tepat waktu.
6. Fransisca Desi Kristanti adalah sahabat sekaligus partner di dalam menjalani kehidupan perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari, sahabat sebelum perkuliahan di semester satu dimulai hingga akhirnya menempuh penulisan skripsi ini secara bersama-sama, sahabat yang selalu mendapatkan nilai yang baik hingga buruk secara bersama-sama,

sahabat yang selalu mendukung, mengingatkan dan mendoakan satu sama lain.

7. Yustin Wijaya adalah partner yang selalu setia mendengarkan keluhan saya selama menjalani proses penulisan skripsi ini, namun sosok beliau juga selalu mendoakan dan selalu memotivasi saya ketika saya sedang putus asa di dalam penulisan skripsi ini khususnya.
8. Elly, Ruth, Vira merupakan sahabat yang selalu ada dan mendampingi selama kuliah serta selalu mendoakan satu sama lain dan selalu membantu satu sama lain.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini.

Penulis sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dikarenakan tanpa Kuasa Tuhan dan bimbingan Tuhan penulis tidak mampu menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini pun, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap kepada para pihak untuk memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan tulisan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandung, 20 December 2018

Novianti

Daftar Isi

Abstrak	i
<i>Abstract</i>	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Rumusan Masalah	23
1.4 Tujuan Penelitian	23
1.5 Manfaat Penelitian	23
1.6 Sistematika Penulisan	24
BAB II.....	26
KERANGKA TEORI	26
2.1 Kebijakan	26
2.1.1 Kebijakan Publik.....	28
2.2 Konsep Strategi Dalam Implementasi Kebijakan Publik.....	29
2.2.1 Definisi Strategi	29
2.2.2 Definisi Implementasi Strategi.....	32
2.2.3 Proses Implementasi Strategi	34
2.2.4 Penghambat Implementasi Strategi.....	35
2.2.5 Strategi Gerakan Literasi Digital Di masyarakat	35
2.2.5.1 Penguatan penggunaan aplikasi atau perangkat digital.....	36
2.2.5.2 Peningkatan Jumlah dan Ragam Sumber Belajar Bermutu	37
2.2.5.3 Perluasan Akses Sumber Belajar dan Cakupan Peserta Belajar	38
2.2.5.4 Peningkatan Pelibatan Publik.....	39
2.2.5.5 Penguatan Tata Kelola	39
2.3.1 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik.....	43
2.3.2 Implementasi Kebijakan Publik	56

2.3.3 Teori Yang Akan Digunakan Dalam Penelitian ini	58
2.3.4 Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier	59
2.4 Pengertian <i>E-Government</i>	77
2.4.1 Tujuan dan Manfaat E-Government.....	79
2.4.2 Tipe Relasi E-government.....	80
2.5 <i>Literacy</i>	84
2.5.1 E-literacy	86
2.5.2 Evolusi E-literacy	88
2.5.3 Prinsip Dasar Pengembangan Literasi Digital	91
2.6 Indikator Literasi Digital.....	95
2.6.1 Indikator Literasi Digital Di Sekolah	95
2.6.2 Indikator Literasi Digital Di Keluarga	96
2.6.3 Indikator literasi Digital Di Keluarga	97
2.6.4 Indikator Literasi Digital Di Masyarakat	97
2.7 Tantangan <i>E-literacy</i>	98
2.8 Strategi <i>E-literacy</i>	100
2.9 Model yang digunakan dalam Literasi Digital Sebagai Kecakapan Hidup Masyarakat Kota Bandung	103
2.9.1 Landasan Hukum Yang Mendukung Pengembangan <i>E-government</i>	105
2.9.2 Model Penelitian Yang Akan Digunakan	114
BAB III	116
METODE PENELITIAN.....	116
3.1 Tipe Penelitian	116
3.2 Peran Peneliti	119
3.3 Lokasi Penelitian.....	119
3.4 Operasional Variabel.....	120
3.5 Sumber Data.....	126
3.6 Prosedur Pengumpulan Data	127
3.6.1 Wawancara	128
3.6.2 Studi Dokumen	129
3.7 Analisis Data	130
3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan	134
BAB IV	137
PROFIL DISKOMINFO KOTA BANDUNG.....	137

4.1	Sejarah DISKOMINFO Kota Bandung	137
4.2	Visi dan Misi Diskominfo Kota Bandung	142
4.2.1	Visi Diskominfo Kota Bandung.....	142
4.2.2	Misi Diskominfo Kota Bandung	142
4.3	Tupoksi Diskominfo Kota Bandung	143
4.3.1	Tugas Pokok.....	143
4.3.2	Fungsi.....	143
4.4	Tupoksi Bidang	144
4.4.1	Sekretariat	144
4.4.2	Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Sumberdaya Teknologi Informasi dan Komunikasi	146
4.4.3	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	149
4.4.4	Bidang Data dan Statistik.....	151
4.4.5	Badan Persandian dan Aplikasi Informatika.....	153
4.4.6	Bidang Diseminasi Informasi.....	155
4.4.7	Unit Pelaksana Teknis Pusat Manajemen Informasi Pemerintahan.....	157
4.4.8	Unit Pelaksana Teknis Radio Sonata	158
4.5	Program dan Kegiatan.....	158
4.6	Struktur Organisasi	162
BAB V		164
Pembahasan Penelitian.....		164
5.1	Gambaran Umum	164
5.2	Lima Strategi Yang Digunakan Di Dalam Gerakan Literasi Digital Di Masyarakat	167
5.2.1	Penguatan Penggunaan Aplikasi Atau Perangkat Digital	167
5.2.1.1	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Atau Perangkat Digital	167
5.2.1.2	Pelatihan penulisan dan pembuatan blog atau media jurnal harian daring guna menguatkan penggunaan aplikasi atau perangkat digital 171	
5.2.1.3	Pelatihan penggunaan perangkat atau aplikasi internet yang bijaksana	174
5.2.1.4	Sosialisasi terhadap bahan referensi hukum dan etika dalam penggunaan media digital	176
5.2.2	Peningkatan Jumlah Dan Ragam Sumber Belajar Bermutu	180
5.2.2.1	Penyediaan sumber belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi di ruang publik.....	180

5.2.2.2 Pemerintah menyebarkan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat melalui alternatif seperti media sosial.....	182
5.2.3 Perluasan Akses Sumber Belajar Dan Cakupan Peserta Belajar	185
5.2.3.1 Penyediaan akses internet di ruang publik	185
5.2.3.2 Tabel Presentase Fasilitas Umum Yang Memiliki <i>Wifi</i>	185
5.2.3.3 Penyediaan informasi melalui media digital di ruang publik.....	187
5.2.4 Peningkatan Pelibatan Publik.....	189
5.2.4.1 Keterlibatan <i>stakeholder</i> melalui <i>sharing session</i>	189
5.2.4.2 Keterlibatan para pemangku kepentingan di dalam meningkatkan literasi digital masyarakat	190
5.2.5 Penguatan Tata Kelola	191
5.2.5.1 Kesepakatan atau aturan guna meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan literasi digital	191
5.2.5.2 Mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan literasi digital masyarakat.....	192
5.2.5.3 Tabel Perbandingan Anggaran 2016 hingga 2018.....	193
5.3 Rekap Jawaban kuesioner lima strategi yang digunakan di dalam gerakan literasi digital di masyarakat	193
5.3.1 Tabel Lima Strategi Yang Digunakan Di dalam Gerakan Liteasi Digital Di Masyarakat (Total Dalam Presentase).....	194
5.4 Sebelas (11) Indikator Literasi Digital	194
5.4.1 Jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki setiap fasilitas publik	195
5.4.2 Frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital setiap hari	197
5.4.3 Jumlah bahan bacaan literasi yang dibaca oleh masyarakat setiap harinya	199
5.4.4 Jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan literasi digital.....	201
5.4.5 Jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi digital.....	203
5.4.6 Peningkatan jumlah kegiatan literasi digital yang ada dimasyarakat.....	204
5.4.7 Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi digital	207
5.4.8 Jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat.....	209
5.4.9 Pemanfaatan media digital dan internet dalam memberikan akses informasi dan layanan publik	210
5.4.10 Pemahaman masyarakat terkait penggunaan internet dan UU ITE.	212
5.4.11 Ketersediaan akses dan pengguna atau melek internet suatu daerah ...	214

5.5	Rekap Jawaban kuesioner sebelas indikator literasi digital	215
5.5.1	Tabel sebelas indikator literasi digital	215
5.6	Pendekatan <i>What's Happening</i>	217
5.6.1	Banyaknya aktor yang terlibat	217
5.6.2	Kejelasan tujuan	218
5.6.3	Partisipasi pada semua unit pemerintahan	220
5.7	Kesesuaian antara strategi dengan literasi digital kelompok sasaran di Kota Bandung	222
	Bab VI.....	230
	Kesimpulan dan Saran.....	230
6.1	Simpulan	230
6.2	Saran.....	236
	Daftar Pustaka	237
	Lampiran.....	238

Daftar Tabel

Tabel	1.1.1	<i>Online</i>	<i>Service</i>		
<i>Index</i>			3		
Tabel	1.1.2	<i>Telecommunication</i>	<i>Infrastructure</i>		
<i>Index</i>			3		
Tabel	1.1.3	<i>Human</i>	<i>Capital</i>		
<i>Index</i>			4		
Tabel 1.1.4	<i>E-government Development Index 2018</i>			6	
Tabel	1.1.5	<i>E-participation</i>	<i>index</i>		
<i>2018</i>			7		
Tabel	1.2.1	Komposisi	Pengguna	Internet	Berdasarkan
Usia.....					14
Tabel 1.2.2	Pengguna Internet Berdasarkan Jenis Kelamin.....				15
Tabel	1.2.3	Pengguna	Internet	Berdasarkan	
Daerah.....				16	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi seperti internet pada hari ini memiliki pengaruh yang sangat luas. Hal ini terbukti dengan adanya pengaruh internet sangat berdampak pada tidak hanya sektor swasta melainkan sektor pemerintahan. Khususnya di dalam sektor pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan internet. Peningkatan tersebut tercermin ketika proses mengirimkan data antar dinas, organisasi, hingga lembaga menjadi lebih cepat. Dengan adanya internet diharapkan dapat membantu penerapan kinerja pemerintah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabilitas. Selain itu penerapan internet tersebut dapat menjadi fondasi daripada pelaksanaan penerapan pemerintah yang berbasis *E-government*.

E-government itu sendiri menurut Osborne and Gaebler (1992) merupakan

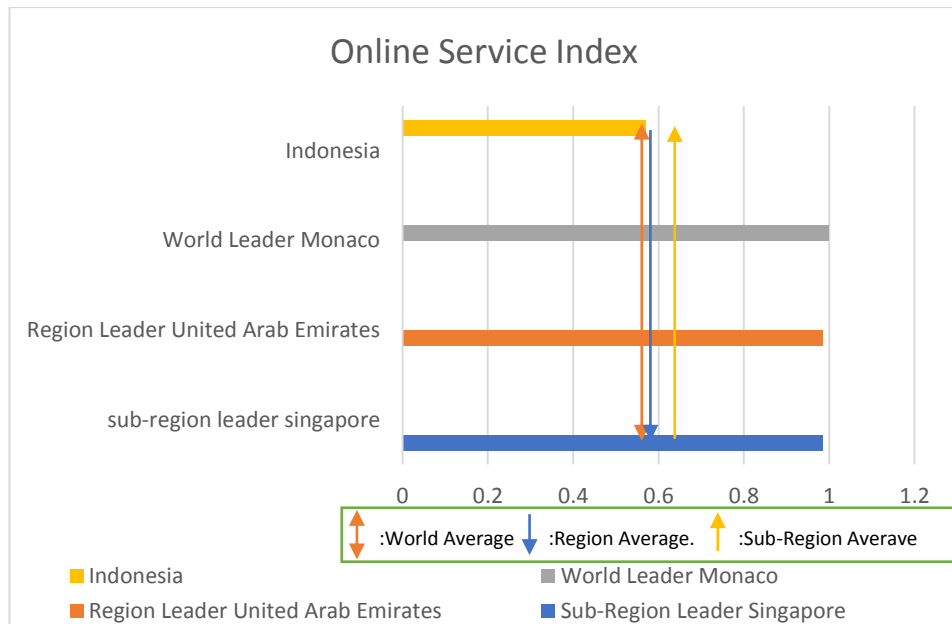
'E-government is the government's use of technology, in particular, web-based internet applications to enhance access and delivery of government services to citizens, business partners, employees and other government entities. It is a way for governments to use the new technologies to provide people with more convenient access to government information and services, to improve the quality of the services and to provide greater opportunities to participate in our democratic institutions and processes.' Dengan kata lain, *E-government* merupakan adanya penggunaan teknologi yang digunakan oleh pemerintah,

khususnya internet berbasis web aplikasi untuk meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat terhadap informasi dan layanan pemerintahan.

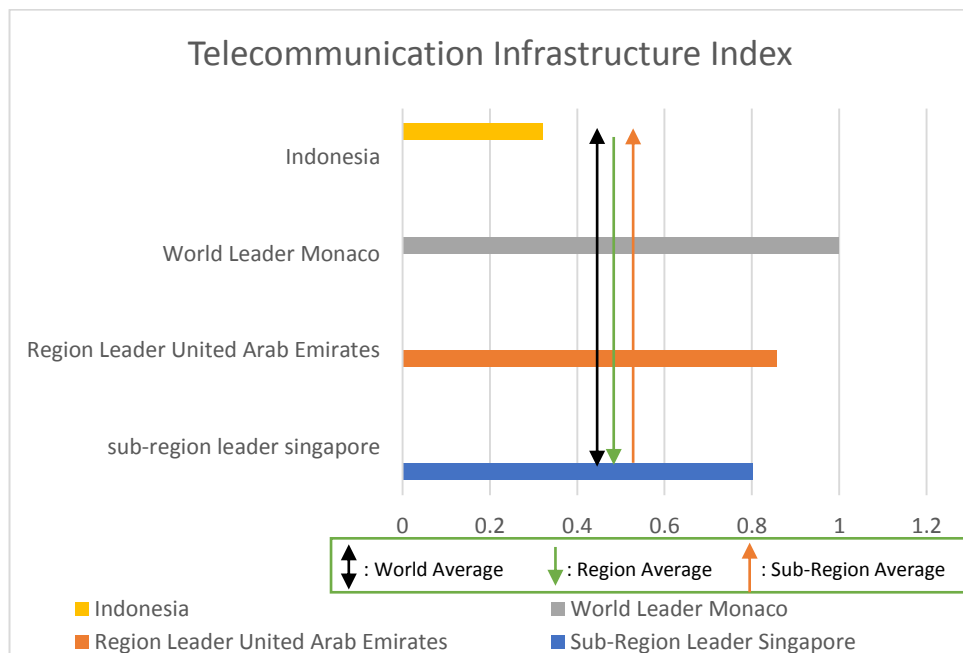
Di dalam pelaksanaannya *E-government* diharapkan dapat menjadikan pelayanan pemerintah yang efektif dan efisien sehingga dapat mencapai keterbukaan informasi publik yang optimal bagi masyarakat luas yang berada di Indonesia. Untuk membuktikan bahwa dengan adanya pelaksanaan *E-government* mampu membantu kinerja hingga pelayanan publik yang optimal maka dapat diukur melalui lembaga survey yang dilakukan oleh pihak PBB. Yang mana, PBB mempublikasikan peringkat *E-government Development Index (EGDI)*. EDGI merupakan gambaran daripada kondisi pengimplementasian *E-government* yang menilai apakah dengan adanya kehadiran EDGI penerapan *E-government* mampu menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penilaian tersebut tercermin pada survey EDGI yang diperoleh tahun 2018. Di dalam penilaian survey terhadap EDGI tentu terdiri dari setidaknya tiga sub-komponen utama yang terdiri dari *Online Service Index; Telecommunication Infrastructure Index; and Human Capital Index*. Berikut adalah bagan yang akan memaparkan hasil daripada penilaian ketiga sub-komponen utama tersebut:¹

¹ <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018>
diakses pada hari jumat 14 september 2018 pada pukul 15.00

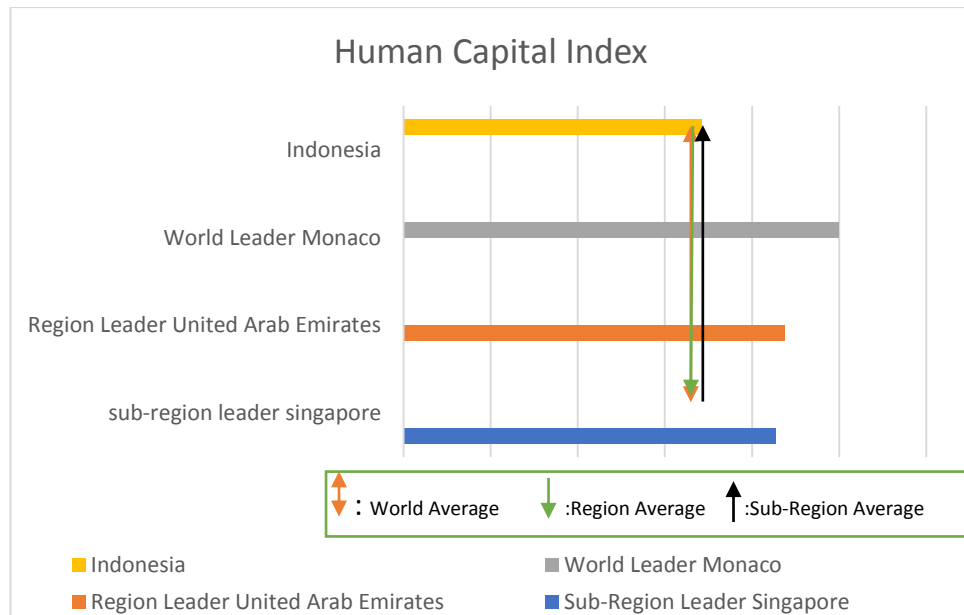
Tabel 1.1.1 Online Service index



Tabel 1.1.2 Telecommunication Infrastructure Index



Tabel 1.1.3 Human Capital Index



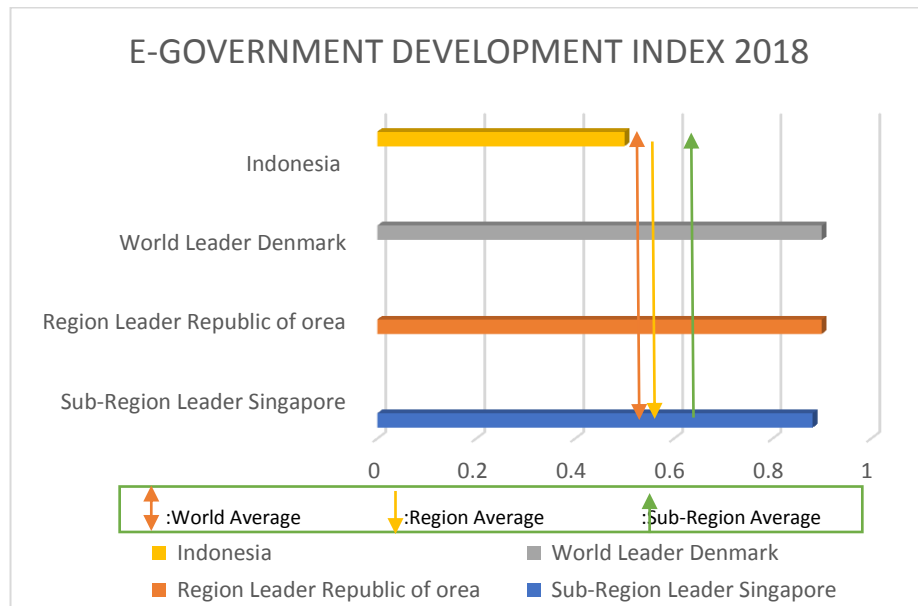
Berdasarkan ketiga sub-komponen yang telah dipaparkan maka Indonesia menduduki nilai index sebesar 0,5694 di dalam penggunaan bidang *Online Service Index* tahun 2018. Index ini menunjukkan bahwa Indonesia kalah saing ketimbang negara tetangga kita yakni Singapore. Yang mana negara Singapore berhasil menduduki nilai index sebesar 0,9861 di dalam penggunaan bidang *Online Service Index*. Sementara di bidang *Telecommunication Infrastructure Index*, Indonesia juga kalah telak dengan Singapore. Dimana negara Singapore menduduki nilai index sebesar 0,8019. Terdapatnya selisih sebanyak 0,4797 peringkat dengan negara Indonesia. Yang mana negara Indonesia menduduki nilai index sebesar 0,3222. Adapun sub-komponen ketiga yakni Human Capital Index 2018. Di dalam sub komponen ini Indonesia tidak hanya kalah telak dengan negara sesama asia yakni Singapore melainkan Indonesia juga kalah telak dengan Australia. Yang mana Indonesia menempati urutan 0,6857 di dalam *Human*

Capital Index tahun 2018. Adanya urutan komponen diatas menjadi salah satu perhitungan yang menentukan performa akan pelaksanaan *E-government* di Indonesia. Negara Indonesia menjadi negara yang tertinggal di dalam pelaksanaan *E-government* yang tercermin di dalam tiga sub-komponen diatas. Ketiga sub-komponen diatas sangatlah mempengaruhi hasil survey yang dilakukan oleh PBB itu sendiri, yang mana survey tersebut terdiri dari dua komponen besar yang terdiri dari *E-Governmnet Development Index and E-Participation Index*.

Menurut EDGI Rank pada tahun 2016, Indonesia berada pada peringkat ke 116. Sementara pada tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat 107. Menurunnya angka pelaksanaan daripada '*E-Government Development Index*' ini di dukung dengan E-Participation Index. Yang mana partisipasi negara Indonesia pada tahun 2016 berada pada peringkat 114 sementara tahun 2018 terjadi kenaikan yang signifikan yang tercermin pada Indonesia berada pada peringkat 92.² Berikut adalah bagan yang akan memaparkan *E-Government Development Index* beserta *E-Participation Index*:

Tabel 1.1.4 *E-government Development Index 2018*

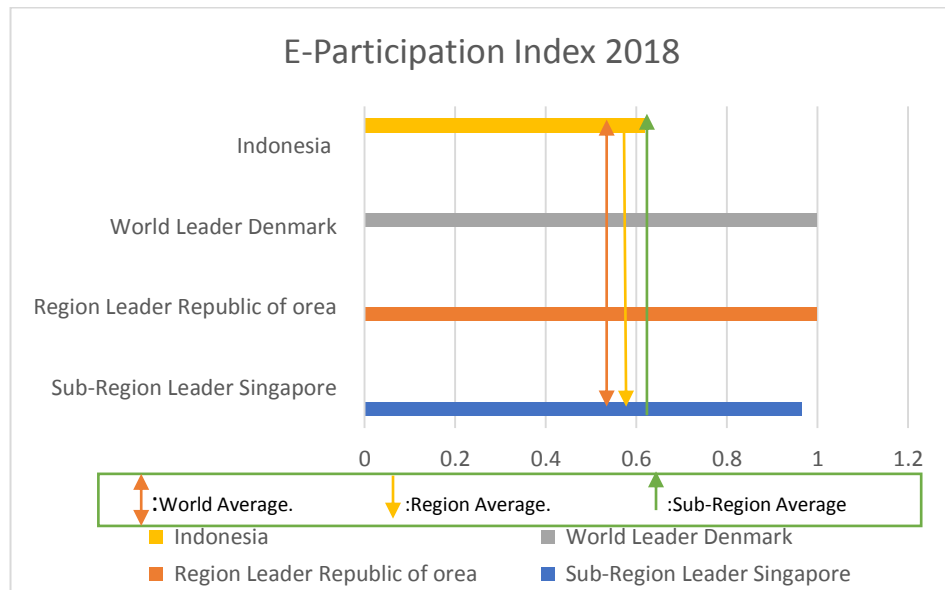
²<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018>
diakses pada hari jumat 14 september 2018 pada pukul 15.00



EDGRI RANK	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Indonesia	106	109	97	106	116	107

(Sumber: E-Government Survey 2018)

Tabel 1.1.5 E-Participation Index 2018



EDGRI RANK	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Indonesia	135	86	66	110	114	92

(Sumber: E-Government Survey 2018)

Lebih lanjut di dalam pelaksanaan *E-government* di Indonesia tentu didasari oleh landasan hukum yakni Inpres No 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*. Pengembangan *E-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Berdasarkan pengertian diatas maka pemerintah diharapkan mampu memanfaatkan kemajuan TIK untuk meningkatkan kemampuan tidak hanya mengelola, menyalurkan hingga mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Selain itu dengan adanya pengembangan *e-government* maka diharapkan pemerintah mampu melaksanakan perumusan

strategi atau *action plan* di dalam setiap instansi terkait sebagai sebuah komitmen di dalam pengembangan *e-government*. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan pula penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Setidaknya untuk mewujudkan manfaat yang optimal maka harus ada aktivitas yang dilakukan. Rangkaian aktivitas yang dilakukan setidaknya terdiri dari dua hal. Aktivitas pertama adalah pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik. Aktivitas kedua yakni pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah negara Indonesia khususnya. Selain itu, untuk mewujudkan pengembangan *e-government* tentu harus mengacu daripada tujuan pengembangan *E-government* yang terdiri dari empat hal yakni³:

- a) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- b) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.

³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

- c) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
- d) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Lebih lanjut di dalam pembahasan akan pengembangan *e-government* itu sendiri, setidaknya terdapat enam pembahasan tentang strategi pengembangan *e-government* guna mewujudkan tujuan pengembangan *e-government* itu sendiri. Strategi yang pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. Strategi yang kedua adalah menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Lebih lanjut, strategi yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sementara strategi yang keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Strategi kelima adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat. Strategi yang terakhir yakni strategi keenam adalah melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur.

Mengacu pada Instruksi Presiden untuk mewujudkan pengembangan daripada *e-government* maka peneliti ingin menyoroti strategi kelima yakni mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik pada pemerintah

maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat. Ketertarikan peneliti di dalam strategi kelima ini tentu dilandaskan kepada adanya unsur '*urgent*' yang dirasakan terhadap SDM itu sendiri. SDM yang di kategorikan dalam hal ini merupakan masyarakat di dalam lingkup baik itu Dinas komunikasi dan Informatika ataupun di dalam lingkungan masyarakat luas. Yang mana menurut Inpres no 3 tahun 2003, SDM baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna daripada *e-government* merupakan faktor yang turut menentukan bahkan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan *e-government*. Demi mewujudkan pengembangan terhadap SDM tentu diperlukan upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya informasi serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (*e-literacy*) baik di dalam kalangan pemerintah dan pemerintah daerah otonom maupun dikalangan masyarakat dalam rangka mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat informasi (*information society*). Demi terwujudnya masyarakat yang tidak hanya memiliki kesadaran, serta pemahaman maka dibutuhkan pendidikan atau bahkan penyelenggaraan seminar agar masyarakat melek akan pentingnya unsur teknologi dan informatika ini.

Esensi akan pentingnya pengembangan *e-literacy* masyarakat melalui pengembangan *e-government* itu sendiri menjadi sangat penting dirasakan. Hal ini tergambar pada reformasi birokrasi yang kerap kali di tata ulang. Penata ulangan reformasi birokrasi terlihat pada proses perbaikan birokrasi yang dilakukan berulang kali yang bertujuan untuk menjadikan birokrasi yang tidak hanya efektif,

efisien melainkan produktif untuk kedepannya. Lebih lanjut, perlunya pengembangan *e-government* itu sendiri di dalam reformasi birokrasi tercantum di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 11 Tahun 2011 yakni tercantum sebagai indikator keberhasilan reformasi birokrasi yang mana salah satu daripada indikator kinerja keberhasilannya adalah pengembangan *E-government*.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin bermaksud ingin melihat strategi peningkatan *e-literacy* masyarakat dalam pelaksanaan *e-government* di Diskominfo Kota Bandung. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya di dalam menggunakan pelayanan publik itu sendiri. Selain itu penelitian ini menyoroti akan literasi digital kelompok sasaran program *e-literacy* khususnya; strategi dari Diskominfo di dalam membangun kesadaran *e-literacy* masyarakat di dalam pembangunan *e-government*; hingga akankah strategi tersebut sesuai dengan literasi digital kelompok sasaran program *e-literacy* itu sendiri.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber terdapat berbagai manfaat di dalam pengembangan *E-literacy* melalui *E-government* yang nantinya akan mempengaruhi dampak dari pelaksanaan implementasi *E-government* itu sendiri. Namun di dalam proses pengembangan *E-government* terdapat beberapa point masalah yang menjadi perhatian khusus yang tercermin sebagai berikut:

1. Adanya *Digital Divide* (Kesenjangan Digital) Yang Tinggi Yang Terwujud Di Dalam Masyarakat Kota Bandung

Digital divide (Kesenjangan Digital) merupakan terdapatnya ketidakmerataan akses dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika (TIK) yang dapat dilihat dengan perbedaan usia, gender, wilayah geografis dan juga tempat kerja.⁴ Unsur *Digital Divide* kental dirasakan tidak hanya di dalam negara berkembang melainkan di dalam lingkungan antar anggota masyarakat juga. Yang mana, walaupun suatu negara telah tergolong ke dalam negara berkembang, masih sangat disayangkan bahwa anggota antar masyarakat masih merasakan kesulitan di dalam mengakses ketersediaan informasi.

Sementara berdasarkan OECD tahun 2001, kesenjangan digital didefinisikan sebagai berikut:

“...the gap between individuals, households, businesses, and geographic areas at different socio-economic levels with regard both to their

⁴<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31430/1/Syopiansyah%20Jaya%20Putra.pdf> diakses pada hari jumat 14 september 2018 pada pukul 15.00

opportunities to access information and communication technologies (Its) and to their use of the internet for a wide variety of activities.”⁵

Pengertian diatas dapat disimpulkan dengan adanya kesenjangan yang terjadi antara tingkat individu, rumah tangga, bisnis, dan area geografi yang tingkat sosial ekonominya berbeda, berdasarkan kesempatan mereka untuk mengakses teknologi informasi dan komunikasi.

Lebih lanjut, di dalam definisi kesenjangan digital itu sendiri , terdapat kata kunci yakni ketidakmerataan akses akan TIK yang dilihat dengan perbedaan usia, gender, wilayah geografis dan juga tempat kerja. Merujuk kepada pengertian diatas maka terdapat beberapa *keyword* perihal ketidakmerataan akses akan TIK berdasarkan perbedaan usia , gender, wilayah geografis dan juga tempat kerja dapat diklasifikan berdasarkan hasil survey yang dilakukan langsung oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang melakukan survey khusus pada Kota Bandung. Yang mana hasil survey pada tahun 2016 dan tahun 2017 diklasifikasikan kepada komposisi pengguna internet berdasarkan usia maka teridentifikasi sebagai berikut:⁶

⁵ Organisation for Economic Co-Operation and Development, OECD 2001. Understanding the digital divide. OECD Publication, Paris.

⁶ [https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII 2017_v1.3.pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII%202017_v1.3.pdf) diakses pada hari jumat 14 september pada pukul 13.00

1.2.1 Tabel Komposisi Pengguna Internet Berdasarkan Usia

Tahun	Usia	Persentase	Tahun	Usia	Persentase
2016	10-24 tahun	18,4%	2017	13-18 tahun	16,68%
2016	25-34 tahun	24,4%	2017	19-34 tahun	49,52%
2016	>35-44 tahun	29,2%	2017	35-54 tahun	29,55%
2016	45-54 tahun	18%	2017	>54 tahun	4,24%
2016	>55 tahun	10%	2017		

Berdasarkan hasil survey diatas maka terlihat sangat jelas bahwa memang betul terjadi kenaikan secara signifikan didalam penggunaan internet berdasarkan kisaran umur 19-34 tahun. Kenaikan secara signifikan itu dirasakan sebesar 25,12%. Faktor usia yang masih produktif tentu memicu penggunaan internet yang pesat serta pemahaman yang lebih cepat diserap oleh umur tersebut cenderung jauh lebih pesat ketimbang umur lanjut usia. Hal ini terlihat pada seiring bertambahnya umur pada kisaran umur 35-54 tahun terlihat kenaikan penggunaan internet yang tidak naik dengan pesat. Kenaikan hanya terjadi sebesar 0,35% di dalam penggunaan internet pada usia tersebut. Kondisi ini berlanjut menurun , hal ini terlihat pada hasil survey tahun 2016 dan tahun 2017 akan penggunaan internet pada usia >54 tahun. Yang mana pada tahun 2016 sebanyak 10% penggunaan internet namun terjadinya penurunan penggunaan internet pada tahun 2017 sebesar 5,76%. Sehingga penggunaan internet pada usia >54 tahun

hanya sebesar 4,24%. Berdasarkan data diatas maka diperoleh pemahaman bahwa adanya kesenjangan atau *digital divide* di dalam memahami pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalamnya hal ini bisa saja dipicu oleh faktor usia salah satunya. Hal ini terlihat dari proses daya serap antar tahapan usia yang berbeda-beda. Serta adanya faktor pemahaman akan unsur penggunaan teknologi itu sendiri yang berbeda-beda setiap jenjang usianya.

Disisi lain apabila diidentifikasi pengguna internet berdasarkan jenis kelamin maka terklasifikasikan hasil survey tahun 2016 dan tahun 2017 sebagai berikut:⁷

1.2.2 Tabel Pengguna Internet Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Gender	Presentase	Tahun	Gender	Presentase
2016	Perempuan	47,5%	2016	Laki-Laki	52,5%
2017	Perempuan	48,57%	2017	Laki-Laki	51,43%

Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya informasi serta pendayagunaan teknologi dan komunikasi (*e-literacy*) dapat dilihat berdasarkan referensi survey diatas. Penyebabnya adalah aktor utama dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri merupakan masyarakat itu sendiri yang dapat dikategorikan ke dalam wanita dan laki-laki. Berdasarkan hasil survey diatas terjadi penurunan presentase antara tahun 2016 ke tahun 2017 yang mana terletak pada gender laki-laki khususnya. Yang terjadi

⁷ https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII_2017_v1.3.pdf
diakses pada hari jumat 14 september 2018 pukul 15.00

penurunan sebesar 1,07% didalam penggunaan internet. Disi lain kenaikan akan penggunaan internet cenderung hanya terjadi pada kaum perempuan saja, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kaum perempuan cenderung menggunakan internet untuk mengakses media sosial atau bahkan memanfaatkan internet untuk belanja online. Adanya kebiasaan kaum perempuan ini tentu tidak dapat disamakan pada kaum laki-laki, sehingga adanya penurunan akan penggunaan internet wajar terjadi.

Sementara pada kenyataannya yang kita ketahui adalah penggunaan internet terbesar yakni pulau jawa itu sendiri. Yang mana berdasarkan hasil survey tahun 2017 diperoleh bahwa :⁸

1.2.3 Tabel Pengguna Internet Berdasarkan Daerah

Jawa	Bali-Nusa	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Maluku-Papua
58,08%	5,63%	19,09%	7,97%	6,73%	2,49%

Berdasarkan presentase diatas maka diketahui bahwa memang betul penggunaan internet sangat banyak digunakan di Jawa namun dibalik penggunaan internet tersebut adanya unsur tidak relevan yang disebabkan oleh perhitungan penggunaan internet yang mengacu pada prespektif segi usia. Yang mana terjadi penurunan penggunaan internet di Kota Bandung khususnya pada kaum usia 13-18 tahun yakni sebesar 2,16%. Penurunan penggunaan internet mengalami

⁸ [https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII 2017 v1.3.pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII%202017%20v1.3.pdf) di akses pada hari jumat 14 september 2018 pukul 15.00

penurunan serupa pada kaum usia lanjut yakni sebesar 5,76%. Namun angka penggunaan tertinggi masih dicapai oleh Kota Bandung.

2. Belum Adanya Peningkatan Pelatihan Literasi Pada Masyarakat Kota Bandung

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan bersama Pak Angga masih terdapatnya unsur kurang adanya penyelenggaraan dan pelatihan akan sistem berbasis elektronik masih dirasakan sampai saat ini.⁹ Hal ini terbukti dengan hasil daripada survey yang dilakukan oleh PBB mengenai tingkat partisipasi Negara Indonesia yang menurun pada tahun 2018. Yang mana tingkat partisipasi pada tahun 2018 berada pada urutan 92. Menurunnya tingkat partisipasi ini terlihat jelas perbedaannya dengan tahun 2016 yang mana Negara Indonesia saat itu menduduki urutan 114. Menurut narasumber pula, sosialisasi berupa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dirasakan sampai saat ini masih sosialisasi berbasis *'door to door'*. Yang mana sosialisasi harus berlangsung dengan mendatangkan team ahli dari divisi Diskominfo Kota Bandung. Selain itu sistem sosialisasi berbasis *'door to door'* ini juga lebih mengandalkan mobil internet di dalam sosialisasinya. Adapun contoh sosialisasi berbasis *'door to door'* yang dilakukan oleh Diskominfo melalui program internet sehat. Yang mana di dalam program ini masyarakat diberikan istilah-istilah internet dan bila salah satu dari masyarakat yang ikut berpartisipasi di dalam permainan tersebut maka terdapat beberapa *door price* yang akan diberikan kepada masyarakat tersebut.

Tanpa adanya mobil internet ini beserta program internet sehat ini, maka kecenderungan masyarakat untuk paham akan pentingnya pemerintahan berbasis

⁹ Wawancara dengan Bapak Angga, Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi Diskominfo Pemerintah Kota Bandung pada tanggal 6 september 2018 pukul 13.00

e-government sangat kecil. Yang mana sosialisasi ini hanya dilakukan pada saat *car free day*. Adanya kekurangan sosialisasi hanya berdasarkan pada saat *car free day* adalah Diskominfo tidak dapat merangkul secara keseluruhan masyarakat yang berada pada daerah tertentu untuk ikut terlibat di dalam mewujudkan kesadaran akan pentingnya pemahaman akan TIK ini sesungguhnya. Untuk itu dibutuhkan solusi atau alternatif lain agar semua kalangan masyarakat baik itu ditingkat RT, RW yang berbeda mampu mengetahui sosialisasi tersebut. Salah satu caranya adalah dengan mewujudkan sosialisasi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dimaksud pada Inpres no 3 tahun 2003 yang berbasis *distance learning*, namun sangat disayangkan yang mana sosialisasi ini belum terwujud. Padahal pemanfaatan *distance learning* dapat berdampak besar pada sebagian besar masyarakat. Seperti yang kita ketahui, adanya penggunaan *smartphone* atau laptop saat ini sangat memudahkan mobilisasi aktivitas masyarakat yang berada di kota khususnya. Selain itu dengan adanya penggunaan *smartphone* atau laptop maka sosialisasi melalui media tentu jauh lebih terjangkau kemudahannya. Hal ini juga didukung menurut survey tahun 2017, di peroleh data bahwa sebesar 31,55% masyarakat Kota Bandung memiliki komputer atau laptop dan sebanyak 70,96% masyarakat Kota Bandung memiliki *smartphone* atau tablet.¹⁰ Selain itu sosialisasi yang cenderung berbasis *distance learning* mampu diwujudkan, hal ini didukung pula dengan data survey tahun 2017 yang menyampaikan bahwa masyarakat pengguna internet yang disurvei berdasarkan level ekonomi mayoritas mampu diakses pula oleh masyarakat pada

¹⁰ https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII_2017_v1.3.pdf di akses pada hari jumat 14 september 2018 pukul 15.00

strata ekonomi sosial menengah bagian bawah. Yang mana masyarakat pada golongan tersebut mampu mencapai presentase terbanyak di dalam menggunakan internet sebanyak 74,62%.¹¹

Adanya banyak faktor yang mendukung yang telah dipaparkan diatas, sangat disayangkan tidak didukung dengan adanya *distance learning*. Yang mana *distance learning* mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal, sehingga diharapkan dapat terjadi pemerataan hingga dapat mengurangi kesenjangan di dalam SDM dibidang teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu dengan adanya *distance learning* dapat membantu perencanaan daripada pelaksanaan *E-government* itu sendiri jauh lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Peran Aparatur Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Di Dalam Mendukung *E-literacy*

Merujuk kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 maka diketahui bahwa di dalam pengembangan *E-government*, maka dibutuhkan tidak hanya peran daripada masyarakat di dalam menanggapi teknologi ini. Melainkan dibutuhkannya peran aparatur pada Diskominfo Kota Bandung. Sementara peran aparatur tersebut dapat dilihat dari sistem penataan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks antara lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional. Peran aparatur semakin dirasakan tidak optimal dikala proses

¹¹ [https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII 2017 v1.3.pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII%202017%20v1.3.pdf) di akses pada hari jumat 14 september 2018 pukul 15.00

sosialisasi dilakukan, yang mana proses sosialisasi kebanyakan dibantu oleh relawan TIK ketimbang aparaturnya daripada Diskominfo Kota Bandung sendiri. Selain itu didalam setiap sosialisasi Pak Latif memaparkan bahwa sosialisasi akan pengembangan *e-government* salah satunya dapat dilakukan dengan program sosialisasi siber kreasi.¹² Didalam program ini diberikan penjelasan akan fokus literasi Diskominfo untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia menggunakan media sosial, namun dari segi konten masyarakat harus mampu memilih informasi yang baik. Informasi dapat dikatakan baik apabila informasi tersebut mampu mengedepankan informasi yang dapat memberikan *feedback* akan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bandung khususnya. Selain itu, Diskominfo juga mensosialisasikan kepada masyarakat di dalam memanfaatkan teknologi untuk mengakses pelayanan publik yang paling utama dibutuhkan masyarakat tentu adalah informasinya. Di dalam sosialisasi tersebut dipaparkan ketika mendapatkan informasi tentu masyarakat harus dapat mencerna informasi tersebut valid ,dan relevankah apabila diaplikasikan kedalam kebutuhan akan pelayanan masyarakat Kota Bandung sendiri. Di dalam sosialisasi pada masyarakat diberikan tidak hanya bekal melainkan pemahaman akan pentingnya teknologi zaman sekarang dan besarnya manfaat daripada teknologi itu sendiri. Namun sangat disayangkan adalah di dalam setiap sosialisasi yang dilakukan Diskominfo Kota Bandung terkesan mengangkat tema yang sama dan juga kurangnya inovasi di dalam membangun program-program literasi digital. Hal ini

¹² Wawancara dengan Bapak Moch.Latif Faidah , Ketua Relawan TIK Kota Bandung pada tanggal 9 september 2018 pukul 13.00

terbukti dengan adanya program yang terkesan mengangkat tema yang sama. Sebut saja program internet sehat, pada program ini Diskominfo Kota Bandung yang disosialisasikan pada car free day; tanggal 09 september 2018 khususnya. Di dalam sosialisasi tersebut diberikan pemahaman akan istilah-istilah teknologi maupun istilah internet kepada masyarakat. Beberapa istilah teknologi ini tidak diberikan hanya satu atau dua istilah melainkan lebih dari sepuluh istilah teknologi yang diperkenalkan kepada masyarakat setempat. Pengenalan akan istilah teknologi ini di masukkan ke dalam bentuk permainan ular tangga. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih cepat menyerap istilah-istilah baru yang ada pada teknologi tersebut.

4. Peran Aparatur Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) yang bekerja bersama Aparatur di dalam Kelembagaan Masyarakat Kota Bandung guna mendukung *E-literacy*

Diskominfo bekerja sama dengan beberapa lembaga aparaturnya masyarakat seperti halnya sekolah di dalam meningkatkan tingkat kesadaran serta pemahaman tentang pentingnya informasi serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (*e-literacy*). Hal ini bertujuan untuk mengarahkan terwujudnya masyarakat informasi (*information society*). Baru-baru ini pada tanggal 12 september 2018, para relawan TIK yang bekerja sama bersama Diskominfo Kota Bandung memberikan sosialisasi akan cerdas pahami daring kepada siswa SMK 12 Kota Bandung.¹³ Yang mana di dalam sosialisasi tersebut ditekankan literasi

¹³ Wawancara dengan Bapak Drs. Kusnadi, MM, Kepala Seksi Bidang Komunikasi Website Diskominfo pemerintah Jabar pada tanggal 9 september 2018 pukul 13.00

merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis sangatlah penting dan pembahasan ini selalu dipaparkan paling awal. Selain itu, Diskominfo juga ingin mensosialisasikan akan pemanfaatan internet di bidang sosial-politik terhadap siswa-siswi khususnya. Diharapkannya dengan sosialisasi pada generasi muda mampu menaikkan rasa keingintahuan generasi muda akan teknologi pada sektor pelayanan publik khususnya. Hal ini terbukti pada survey tahun 2017, yang mana sebanyak 36,94% masyarakat mengakses berita politik dan sebanyak 50,26% masyarakat mengakses berita sosial atau lingkungan.¹⁴ Sehingga tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak mampu mengakses pelayanan publik yang telah disosialisasikan oleh Diskominfo khususnya.

Disisi lain kesulitan untuk menjalin kerjasama dengan aparatur di dalam kelembagaan masyarakat yakni RT dan RW masih sangat kental dirasakan ketimbang menjalin kerja sama dengan kelompok sasaran seperti sekolah. Kesulitan tersebut semakin dirasakan dengan penuturan beliau terkait tanpa adanya unsur “*door price*” terkadang sulit mengumpulkan masyarakat Kota Bandung yang berada pada daerah terpencil. Walaupun pada kenyataannya pembuatan undangan akan sosialisasi literasi digital telah disebarakan pada setiap RT dan RW setempat. Tampaknya tanpa unsur “*door price*” tentu akan semakin sulit terwujudnya sosialisasi tersebut.¹⁵

¹⁴ [https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII 2017 v1.3.pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII%202017%20v1.3.pdf) di akses pada hari jumat 14 september 2018 pukul 15.00

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Angga, Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi Diskominfo Pemerintah Kota Bandung pada tanggal 6 september 2018 pukul 13.00

1.3 Rumusan Masalah

Dengan bertolak pada latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- Bagaimana strategi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membangun kesadaran *E-literacy* masyarakat guna membantu pelaksanaan pengembangan E-government?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

Menganalisa bagaimana strategi peningkatan *e-literacy* masyarakat di dalam pelaksanaan *e-government* Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu tujuan penelitian ini bermaksud untuk mencapai tiga hal dibawah:

1. Bagaimana literasi digital kelompok sasaran program *E-literacy*?
2. Bagaimana strategi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membangun kesadaran *E-literacy* masyarakat di dalam pelaksanaan pengembangan *E-government*?
3. Apakah strategi tersebut sesuai dengan literasi digital kelompok sasaran program *E-literacy*?

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermaksud untuk menyumbangkan pemahaman mengenai bagaimana membangun kesadaran *E-literacy* masyarakat Kota Bandung khususnya agar dapat mempengaruhi aspek pembangunan daripada *E-government* tersebut. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan akan dampak daripada adanya pembangunan kesadaran *E-literacy* pada masyarakat mampu memberikan manfaat bagi pelaksanaan daripada *E-government*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi berbagai pihak, sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan untuk menambah wawasan ,dan informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi terhadap bahan penelitian yang lain.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I adalah pendahuluan. Dimulai dengan latar belakang masalah yang ingin diteliti. Peneliti juga mendeskripsikan situasi dilapangan yang terjadi, selain itu peneliti juga merumuskan pertanyaan penelitian.

Bab II adalah kerangka teori. Pada bab ini peneliti menguraikan teori yang sesuai untuk penelitian yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini peneliti menguraikan bagaimana cara melakukan penelitian dan menilai keabsahan daripada penelitian ini.

Bab IV adalah gambaran umum. Pada bab ini peneliti menguraikan bagaimana kondisi umum daripada lapangan yang dijadikan tempat penelitian berlangsung.

Bab V adalah pembahasan. Pada bab ini peneliti mengungkap hasil wawancara yang telah dilakukan sesuai dengan variabel dari teori yang digunakan. Selain itu, bab ini menguraikan hasil jawaban dari pertanyaan penelitian yang sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.

Bab VI adalah kesimpulan dan saran. Pada bab ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang sesuai dengan hasil penelitian dilapangan.